

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.01, April 2024, pp. 13– 24

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

## EVALUASI INDEKS KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH: STUDI KASUS KABUPATEN BERAU, KALIMANTAN

TIMUR

ANGGITA GHASSANI PUTRI<sup>1</sup>

[Anggita.gputri@gmail.com](mailto:Anggita.gputri@gmail.com)

Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Berau,  
Indonesia

### ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) Kabupaten Berau tahun 2021, dengan fokus pada tiga dimensi: proses penyusunan, isi dokumen, dan jaminan tindak lanjut. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menentukan bobot indikator penilaian kualitas, dengan pengumpulan data melalui kuesioner, studi dokumentasi, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan. Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) RKPD Kabupaten Berau Tahun 2021 mendapat predikat "Baik" dengan rata-rata nilai 81,28. Dimensi jaminan tindak lanjut memberikan kontribusi terbesar (34,81), disusul oleh dimensi isi dokumen (26,79) dan proses penyusunan dokumen (19,69). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi jaminan tindak lanjut memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas perencanaan, menyoroti perlunya integrasi lebih baik antara dokumen perencanaan dan implementasi. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai praktik perencanaan pembangunan daerah, yang dapat menjadi acuan bagi wilayah lain di Indonesia.

**Kata Kunci:** Indeks Kualitas Perencanaan, IKP, Analisis Hirarki Proses, RKPD

### ABSTRACT

The study evaluates the Planning Quality Index (Indeks Kualitas Perencanaan - IKP) for Berau Regency in 2021, focusing on three dimensions: the planning process, document content, and assurance of follow-up. The Analytical Hierarchy Process (AHP) method was employed to weight the indicators of quality assessment, and data collection involved questionnaires, documentation studies, and Focus Group Discussions (FGDs) with multi-stakeholders. The Planning Quality Index (IKP) of the RKPD of Berau Regency in 2021 is overall categorized as "Good," with an average score of 81.28. The dimension of follow-up assurance contributed the highest weighted score of 34.81, followed by the document content dimension with a weighted score of 26.79, and the document preparation process dimension with a score of 19.69. The findings reveal that the follow-up dimension

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.08, No.01, April 2024, pp. 13– 24

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

significantly influences planning quality, emphasizing the need for improved integration between planning documents and implementation. The research offers insights into regional development planning practices, serving as a benchmark for other regions in Indonesia

**Keywords:** Planning Quality Index ; Analytical Hierarchy Process, RKPD

## LATAR BELAKANG

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan tujuan utama dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (Indonesia, n.d.). Proses pembangunan daerah harus terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional melalui dokumen perencanaan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen-dokumen ini menjadi pedoman strategis untuk memastikan pembangunan yang efisien, efektif, dan berkeadilan (Rahadian Auliansyah, 2024).

Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, adalah salah satu kabupaten dengan potensi sumber daya alam yang signifikan, termasuk tambang batubara, perkebunan kelapa sawit, dan sektor kelautan. Namun, percepatan pembangunan daerah memerlukan perencanaan yang matang untuk mengelola sumber daya ini secara berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, evaluasi kualitas perencanaan pembangunan menjadi sangat relevan 1. untuk memastikan dokumen

perencanaan mampu menjadi alat manajemen pembangunan yang efektif.

Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) adalah alat yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan daerah. IKP Kabupaten Berau 2021 mengevaluasi tiga dimensi utama: proses penyusunan dokumen, isi dokumen, dan jaminan tindak lanjut. Laporan ini menjadi upaya penting untuk mengidentifikasi kelemahan, mendorong perbaikan, dan membangun sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Berau (Littik, 2023).

Meskipun Kabupaten Berau telah memiliki mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, tantangan dalam integrasi dan implementasi perencanaan masih menjadi isu yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi IKP Kabupaten Berau sebagai langkah untuk memperbaiki kualitas dokumen perencanaan dan mengoptimalkan hasil pembangunan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, kami tentukan beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan (RKPD

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.01, April 2024, pp. 13– 24

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

- Kabupaten Berau 2021) ditinjau dari pelaksanaan Musrenbang di tingkat kampung, kecamatan, dan kabupaten?
2. Bagaimana gambaran keseluruhan kualitas perencanaan Kabupaten Berau 2021 berdasarkan dimensi proses, isi dokumen, dan jaminan tindak lanjut?

## KAJIAN PUSTAKA

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses sistematis untuk merencanakan dan mengelola pembangunan di tingkat regional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan Pembangunan mencakup penentuan prioritas berdasarkan analisis kebutuhan, potensi, dan keterbatasan daerah. Dalam hal ini, perencanaan daerah harus dirancang secara rasional dan efisien, dengan mempertimbangkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dinamika sosial-ekonomi setempat (Marwah Auliyani & Muhammad Yafiz, 2022).

Di Indonesia, perencanaan pembangunan daerah diatur oleh berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjadi dasar utama yang mengintegrasikan perencanaan nasional dan daerah dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, top-down, dan bottom-up (Peraturan Pemerintah, n.d.). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan hukum bagi

daerah untuk menyusun dokumen-dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (Pemerintah Pusat, n.d.). Lebih lanjut, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, termasuk tahapan konsultasi publik dan penyelarasan dokumen dengan kebijakan pusat.

Metode pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah adalah pendekatan strategis dan teknis yang dirancang untuk memastikan perencanaan berjalan efektif, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Pendekatan teknokratik, seperti yang dijelaskan oleh Suzetta (2007), menekankan penggunaan data empiris, hasil penelitian, dan proyeksi statistik untuk menghasilkan keputusan pembangunan yang berbasis fakta. Widodo (2006) menambahkan bahwa pendekatan ini mendukung pengelolaan sumber daya secara efisien dan memungkinkan perencanaan strategis yang berkelanjutan (Setiawan, n.d.). Sementara itu, pendekatan partisipatif, sebagaimana diuraikan oleh Sumarsono (2010), menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Forum ini melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.08, No.01, April 2024, pp. 13– 24

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

memastikan aspirasi lokal terintegrasi dalam rencana pembangunan, sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap program yang dihasilkan.

Dalam konteks Indonesia, perencanaan pembangunan menggunakan pendekatan campuran top-down dan bottom-up. Riyadi dan Bratakusumah (2003) menjelaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan kebijakan nasional (top-down) untuk diselaraskan dengan aspirasi masyarakat lokal (bottom-up), menciptakan sinergi antara pusat dan daerah. Selain itu, pendekatan integratif menjadi kunci dalam menghubungkan dimensi sektoral, spasial, dan temporal pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menegaskan pentingnya perencanaan yang mengintegrasikan berbagai sektor dan wilayah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini memastikan konsistensi antara visi, strategi, dan implementasi program pembangunan (Farahwati, 2020).

Selain itu, evaluasi dan pengawasan merupakan elemen penting dalam pelaksanaan perencanaan. Evaluasi berfungsi untuk menilai input, output, dan outcome dari program pembangunan, sementara Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 memberikan pedoman untuk memastikan akuntabilitas dalam implementasi rencana.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) Kabupaten Berau Tahun 2021 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian melibatkan analisis data primer dan sekunder untuk mengukur dimensi kualitas perencanaan yang meliputi proses penyusunan, isi dokumen, dan jaminan tindak lanjut. Pendekatan yang digunakan dirancang agar sesuai dengan kompleksitas analisis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan indikator penilaian (Kuncoro, 2018).

## Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dengan fokus pada dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu Januari hingga Desember 2021, meliputi tahap pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan.

## Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif deskriptif untuk menilai kualitas perencanaan daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan metode kuantitatif melalui penilaian berbasis skala Likert dan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait.

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.01, April 2024, pp. 13– 24

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

## Data Penelitian

Data penelitian dalam studi ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang saling melengkapi untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Berau. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disampaikan kepada peserta Musrenbang di tingkat kampung, kecamatan, dan kabupaten, bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi, transparansi, dan kualitas diskusi. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan pejabat perencana di BAPPEDA, tokoh masyarakat, dan perwakilan OPD untuk memahami persepsi mereka terhadap proses penyusunan, isi dokumen, dan jaminan tindak lanjut perencanaan. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion/FGD) juga dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan utama untuk memvalidasi hasil analisis dan menggali isu-isu strategis terkait kualitas perencanaan. Sementara itu, data sekunder terdiri dari dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021, laporan kegiatan OPD, dokumen anggaran, dan laporan evaluasi tahunan. Data sekunder ini digunakan untuk mengevaluasi kelengkapan dokumen, ketaatan terhadap jadwal, dan konsistensi antara rencana yang telah disusun dengan implementasinya. Kombinasi kedua jenis data ini memberikan basis yang kuat untuk

mengevaluasi kualitas perencanaan berdasarkan dimensi proses, isi dokumen, dan jaminan tindak lanjut secara mendalam dan menyeluruh.

## Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrumen-instrumen berikut: (1) Kuesioner berisi pertanyaan dengan skala Likert 1–5 untuk mengukur dimensi proses penyusunan, isi dokumen, dan tindak lanjut. (2) Panduan Wawancara: Disusun untuk mengeksplorasi isu spesifik yang relevan dengan dimensi kualitas perencanaan. (3) Panduan FGD: Berfungsi untuk mengevaluasi konsistensi hasil analisis dengan persepsi pemangku kepentingan.

## Analisis Data

Data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut (Soebagiyo, 2007): (1) Pembobotan Indikator dengan AHP (*Analytical Hierarchy Process*) Setiap indikator kualitas perencanaan diberi bobot berdasarkan tingkat pentingnya. Dimensi jaminan tindak lanjut mendapat bobot terbesar (0.413), diikuti oleh isi dokumen (0.327) dan proses penyusunan (0.260) (Rembang, 2022). (2) Konversi Nilai Skala Likert: Jawaban kuesioner dikonversi menjadi nilai untuk mengukur tingkat kualitas pada setiap dimensi. Nilai akhir disesuaikan dengan interval penilaian kualitas, mulai dari buruk hingga sangat baik.

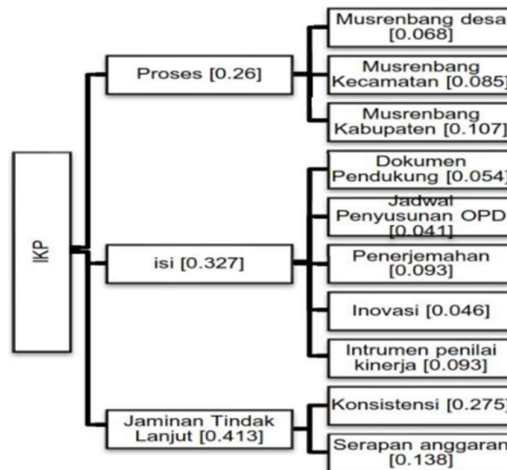
# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.01, April 2024, pp. 13– 24

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>



Gambar 1. Pembobotan Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) Kabupaten Berau

(3) Analisis Kualitatif data berasal dari wawancara dan FGD dianalisis menggunakan teknik tematik untuk mengidentifikasi pola-pola persepsi dan isu-isu utama yang muncul. (4) Interpretasi Hasil: Hasil kuantitatif dan kualitatif diintegrasikan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas perencanaan di Kabupaten Berau.

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### Dimensi Proses Penyusunan Dokumen

Dimensi proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Berau Tahun 2021 dinilai melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tiga tingkatan: kampung, kecamatan, dan kabupaten.

| Indikator Penilaian                                | Nilai IKP | Konversi | Kategori |
|--|-----------|----------|----------|
| Tingkat kehadiran peserta                          | 4,09      | 81,70    | Baik     |
| Komposisi keterwakilan kelompok masyarakat         | 3,87      | 77,45    | Baik     |
| Tingkat keaktifan peserta dalam memberikan masukan | 3,98      | 79,57    | Baik     |
| Keselarasannya rencana program dengan pendanaan    | 3,36      | 67,23    | Cukup    |
| Dukungan masyarakat terhadap hasil musyawarah      | 4,06      | 81,28    | Baik     |
| Penyampaian jadwal musrenbang                      | 3,87      | 77,45    | Baik     |
| Rata-rata IKP                                      | 3,87      | 77,40    | Baik     |

Tabel 1: Rekapitulasi IKP Aspek Musrenbang Kampung

Dalam musrenbang desa, tingkat kehadiran peserta (81,70) dan dukungan masyarakat terhadap hasil musyawarah (81,28) menunjukkan partisipasi yang kuat dari masyarakat.

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.01, April 2024, pp. 13– 24

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil melibatkan berbagai pihak dalam proses perencanaan. Namun, keselarasan rencana program dengan pendanaan (67,23) masih berada di kategori "Cukup." Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aspirasi masyarakat terakomodasi, terdapat tantangan dalam merealisasikan program yang sesuai dengan alokasi anggaran.

| Indikator Penilaian                                | Nilai IKP | Konversi | Kategori |
|--|-----------|----------|----------|
| Tingkat kehadiran peserta                          | 3,90      | 78,08    | Baik     |
| Komposisi keterwakilan kelompok masyarakat         | 3,77      | 75,38    | Baik     |
| Tingkat keaktifan peserta dalam memberikan masukan | 3,60      | 71,92    | Baik     |
| Kesiapan data dan bahan diskusi                    | 3,69      | 73,85    | Baik     |
| Keselarasan rencana program dengan pendanaan       | 3,25      | 65,00    | Cukup    |
| Dukungan masyarakat                                | 3,86      | 77,25    | Baik     |

|                               |      |       |      |
|-------------------------------|------|-------|------|
| terhadap hasil musyawarah     |      |       |      |
| Penyampaian jadwal musrenbang | 3,65 | 73,08 | Baik |
| Rata-rata IKP                 | 3,67 | 73,39 | Baik |

Tabel 2: Rekapitulasi IKP Aspek Musrenbang Kecamatan

Komposisi keterwakilan masyarakat (75,38) menunjukkan bahwa berbagai kelompok masyarakat telah terwakili dengan baik, meskipun keterlibatan kelompok rentan perlu diperkuat. Kesiapan data dan bahan diskusi (73,85) menjadi indikator bahwa pemerintah telah melakukan persiapan yang memadai, meskipun masih ada ruang untuk memperkuat kualitas materi yang disiapkan. Keselarasan rencana program dengan pendanaan (65,00) kembali menjadi kelemahan signifikan, menunjukkan tantangan dalam memastikan ketersediaan anggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan.

| Indikator Penilaian       | Nilai IKP | Konversi | Kategori |
|---------------------------|-----------|----------|----------|
| Tingkat kehadiran peserta | 4,17      | 83,33    | Baik     |
| Komposisi keterwakilan    | 3,87      | 77,33    | Baik     |

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.01, April 2024, pp. 13– 24

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

|  |      |       |       |
|--|------|-------|-------|
| kelompok masyarakat                                |      |       |       |
| Tingkat keaktifan peserta dalam memberikan masukan | 3,97 | 79,33 | Baik  |
| Kesiapan data dan bahan diskusi                    | 3,97 | 79,33 | Baik  |
| Keselarasn rencana program dengan pendanaan        | 3,27 | 65,33 | Cukup |
| Dukungan masyarakat terhadap hasil musyawarah      | 3,97 | 79,35 | Baik  |
| Penyampaian jadwal musrenbang                      | 3,80 | 76,00 | Baik  |
| Rata-rata IKP                                      | 3,86 | 76,54 | Baik  |

Tabel 3: Rekapitulasi IKP Aspek Musrenbang Kabupaten

Tingkat kehadiran peserta (83,33) menunjukkan keberhasilan dalam menarik perhatian para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam Musrenbang tingkat kabupaten. Kesiapan data dan bahan diskusi (79,33) menunjukkan bahwa pemerintah telah mempersiapkan

dokumen perencanaan dengan baik. Keselarasan rencana dengan pendanaan (65,33) kembali menjadi kelemahan utama, menunjukkan adanya kesenjangan antara rencana strategis dan kemampuan pendanaan.

Rata-rata nilai IKP pada dimensi proses penyusunan dokumen adalah 77,11 (kategori "Baik"). Meskipun partisipasi masyarakat dan kesiapan bahan diskusi sudah cukup baik di semua tingkatan, terdapat kelemahan yang konsisten pada aspek keselarasn rencana dengan pendanaan. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih baik dalam sinkronisasi anggaran, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Dengan memperkuat koordinasi antara pemangku kepentingan dan unit anggaran, kualitas perencanaan pada dimensi ini dapat ditingkatkan.

## Dimensi Isi Dokumen

Dimensi ini memiliki rata-rata nilai IKP sebesar 81,34, berada dalam kategori "Baik." Kelebihan dimensi ini terletak pada ketaatan jadwal penyusunan dan kelengkapan dokumen pendukung, yang masing-masing memiliki nilai IKP sebesar 97,78 dan 86,67, keduanya masuk kategori "Sangat Baik." Sebaliknya, inovasi dalam dokumen masih tergolong "Cukup" dengan nilai 66,67, menunjukkan perlunya peningkatan dalam penggunaan teknologi atau pendekatan baru.

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.01, April 2024, pp. 13– 24

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

| Aspek                           | Nilai IKP | Konversi | Kategori    |
|---------------------------------|-----------|----------|-------------|
| Kelengkapan dokumen pendukung   | 4,33      | 86,67    | Sangat Baik |
| Ketaatan jadwal penyusunan      | 4,89      | 97,78    | Sangat Baik |
| Penerjemahan rencana ke program | 3,95      | 78,93    | Baik        |
| Inovasi                         | 3,33      | 66,67    | Cukup       |
| Instrumen penilaian kinerja     | 4,13      | 82,67    | Baik        |

Tabel 4: Rekapitulasi IKP Aspek Isi Dokumen

Ketaatan terhadap jadwal penyusunan dokumen mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan dokumen sesuai dengan tenggat waktu. Namun, aspek inovasi menjadi perhatian karena rendahnya tingkat adopsi teknologi dalam proses perencanaan.

## Dimensi Jaminan Tindak Lanjut

Dimensi ini menunjukkan hasil yang konsisten dengan kategori "Baik," dengan nilai rata-rata IKP sebesar 86,73. Serapan anggaran menjadi aspek paling menonjol dengan nilai 94,13 (kategori "Sangat Baik"), menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program yang direncanakan. Namun, aspek

konsistensi antara dokumen RKPD dan pelaksanaan program masih memerlukan penguatan dengan nilai IKP sebesar 79,33.

| Aspek               | Nilai IKP | Konversi | Kategori    |
|---------------------|-----------|----------|-------------|
| Konsistensi dokumen | 3,97      | 79,33    | Baik        |
| Serapan anggaran    | 4,71      | 94,13    | Sangat Baik |

Tabel 3: Rekapitulasi IKP Aspek Jaminan Tindak Lanjut

| Unsur Penilaian  | IKP  | Bp    | Rata-rata |
|--|------|-------|-----------|
| Proses Penyusunan Dokumen (0,260):                           |      |       |           |
| Aspek Musrenbang Kampung                                     | 77.4 | 0.068 | 5.26      |
| Aspek Musrenbang Kecamatan                                   | 73.3 | 0.085 | 6.24      |
| Aspek Musrenbang Kabupaten                                   | 76.5 | 0.107 | 8.19      |
| Isi Dokumen (0,327):   |      |       |           |
| Aspek Kelengkapan Dokumen Pendukung                          | 86.7 | 0.054 | 4.68      |
| Aspek Ketaatan Jadwal Penyusunan                             | 97.8 | 0.041 | 4.01      |
| Aspek Penerjemahan Perencanaan ke dalam Program dan Kegiatan | 78.9 | 0.093 | 7.34      |
| Aspek Inovasi  | 66.7 | 0.046 | 3.07      |
| Aspek Instrumen Penilaian Kinerja                            | 82.7 | 0.093 | 7.69      |
| Jaminan Tindak Lanjut (0,413):                               |      |       |           |
| Aspek Konsistensi Perencanaan terhadap Dokumen RKPD          | 79.3 | 0.275 | 21.8      |
| Aspek Serapan Anggaran                                       | 94.1 | 0.138 | 12.9      |
| Total Nilai IKP RKPD Tahun 2021                              | 81.3 | 1     | 81.3      |

Tabel 4: Rekapitulasi nilai Indeks

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.08, No.01, April 2024, pp. 13– 24

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Kualitas Perencanaan (IKP) RKPD Kabupaten Berau Tahun 2021

rencana dan pendanaan.

Rekapitulasi nilai Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) RKPD Kabupaten Berau Tahun 2021 memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas dokumen perencanaan berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu proses penyusunan dokumen, isi dokumen, dan jaminan tindak lanjut. Setiap dimensi memiliki kontribusi strategis yang diukur berdasarkan bobot penimbang dan nilai rata-rata tertimbang. Nilai IKP keseluruhan adalah 81,28, masuk dalam kategori "Baik." Berikut pembahasan rinci dari setiap dimensi.

Dimensi isi dokumen memiliki bobot penimbang 0,327 dengan nilai rata-rata tertimbang 26,79. Dimensi ini mencakup kelengkapan dokumen pendukung, ketaatan jadwal penyusunan, penerjemahan rencana ke program dan kegiatan, inovasi, serta fungsi dokumen sebagai instrumen penilaian kinerja. Kelengkapan dokumen pendukung memiliki nilai IKP 86,67 (nilai tertimbang 4,68), menunjukkan kesiapan yang sangat baik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketaatan jadwal penyusunan memperoleh nilai IKP tertinggi sebesar 97,78 (nilai tertimbang 4,01), mencerminkan kedisiplinan waktu yang tinggi. Penerjemahan rencana ke program dan kegiatan mendapatkan nilai IKP 78,93 (nilai tertimbang 7,34), dengan disparitas antar-OPD yang masih terlihat. Aspek inovasi menjadi kelemahan terbesar dengan nilai IKP 66,67 (nilai tertimbang 3,07), menunjukkan perlunya peningkatan penggunaan teknologi dan pendekatan inovatif. Instrumen penilaian kinerja mencatat nilai IKP 82,67 (nilai tertimbang 7,69), mencerminkan fungsi dokumen RKPD yang cukup efektif sebagai alat evaluasi.

Dimensi proses penyusunan dokumen memiliki bobot penimbang 0,260 dengan nilai rata-rata tertimbang 19,69. Dimensi ini menilai kualitas pelaksanaan Musrenbang di tiga tingkatan: kampung, kecamatan, dan kabupaten. Aspek Musrenbang Kampung memiliki nilai IKP 77,40, dengan nilai tertimbang 5,26, mencerminkan partisipasi masyarakat yang baik meskipun keselarasan pendanaan masih menjadi tantangan. Musrenbang Kecamatan mencatat nilai IKP 73,39 (nilai tertimbang 6,24) dengan kekuatan pada keterwakilan masyarakat, meskipun keterlibatan aktif dalam diskusi perlu ditingkatkan. Musrenbang Kabupaten memperoleh nilai IKP 76,54 (nilai tertimbang 8,19) yang didukung oleh kesiapan data dan dukungan masyarakat, tetapi kembali mengalami kendala pada sinkronisasi

Dimensi jaminan tindak lanjut memiliki bobot penimbang terbesar, yaitu 0,413, dengan nilai rata-rata tertimbang 34,81. Dua aspek yang dinilai adalah konsistensi perencanaan terhadap dokumen RKPD dan serapan anggaran. Aspek konsistensi perencanaan memperoleh nilai IKP

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.01, April 2024, pp. 13– 24

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

79,33 (nilai tertimbang 21,82), mencerminkan kesesuaian antara dokumen RKPD, RPJMD, dan APBD, meskipun penyalarsan program masih perlu ditingkatkan. Aspek serapan anggaran mencatat nilai tertinggi di seluruh penilaian, yaitu 94,13 (nilai tertimbang 12,99), menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan program prioritas sesuai anggaran.

Secara keseluruhan, nilai IKP RKPD Kabupaten Berau Tahun 2021 masuk dalam kategori "Baik," dengan kontribusi terbesar berasal dari dimensi jaminan tindak lanjut. Namun, beberapa kelemahan utama, seperti inovasi dan sinkronisasi pendanaan, masih memerlukan perhatian khusus. Rekomendasi untuk perbaikan mencakup peningkatan inovasi dalam proses perencanaan, penyalarsan yang lebih baik antara rencana program dan pendanaan, serta evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) RKPD Kabupaten Berau Tahun 2021 secara keseluruhan berada dalam kategori "Baik" dengan nilai rata-rata 81,28. Dimensi jaminan tindak lanjut memberikan kontribusi tertinggi dengan bobot tertimbang 34,81, diikuti oleh dimensi isi dokumen dengan bobot tertimbang 26,79, dan proses penyusunan dokumen sebesar 19,69. Hasil ini mencerminkan bahwa kualitas perencanaan di Kabupaten

Berau sudah cukup baik dalam hal pelibatan masyarakat, kelengkapan dokumen, dan pelaksanaan program sesuai anggaran. Namun, terdapat kelemahan pada aspek inovasi yang masih berada dalam kategori "Cukup" dengan nilai 66,67, serta keselarasan antara rencana program dengan pendanaan yang menjadi tantangan di semua tingkatan Musrenbang. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pada aspek inovasi dengan mengadopsi teknologi dan pendekatan baru, serta penyalarsan antara rencana dan alokasi anggaran untuk mendukung efektivitas perencanaan. Dengan perbaikan ini, kualitas dokumen RKPD Kabupaten Berau dapat meningkat menuju kategori "Sangat baik" yang mencerminkan dukungan dalam pembangunan daerah yang lebih strategis dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Farahwati, F. (2020). Pembangunan berkelanjutan menjadi dasar terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Legalitas*, 5(1), 65.
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Littik, S. K. A. (2023). Kualitas perencanaan dalam tata kelola program kesehatan di wilayah terpencil kepulauan. *Center for*

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.01, April 2024, pp. 13– 24

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Open Science.

Marwah Auliyani, & Muhammad Yafiz.

(2022). Peran badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(2), 94–105.

Pemerintah Pusat, I. (n.d.-a). *UU No. 23*

*Tahun 2014. Database Peraturan | JDIH* BPK.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Pemerintah Pusat, I. (n.d.-b). *UU No. 25*

*Tahun 2004. Database Peraturan | JDIH* BPK.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40694/uu-no-25-tahun-2004>

Rahadian Auliansyah. (2024).

Implementasi roadmap reformasi birokrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Semarang. *Kemakmuran Hijau: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1–10.

Rembang, P. K. (2022). *Indeks Kualitas*

*Perencanaan 2022 Kabupaten Rembang*. BPKAD.

Rezeki, S. (2021). Peran sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam meningkatkan administrasi publik di lingkungan pejabat area Kabupaten Berau. *Center for Open Science*.

Setiawan, P. (n.d.). Analisis faktor-faktor yang memoderasi pengaruh partisipasi penganggaran terhadap kinerja manajerial (Studi empiris: Organisasi rumah sakit Kota Medan) [Universitas Andalas]. Retrieved November 20, 2024.

Soebagiyo, D. (2007). Model perencanaan ekonomi melalui metode pengambilan keputusan dengan AHP (Analytic Hierarchy Process). *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(1), 29.